

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai suatu negara dengan ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah adalah konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari Indonesia. Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga pola pembangunan ekonomi di Indonesia juga tidak seragam. Ketidakteragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, yang mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Pertumbuhan yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun hasilnya, yakni pendapatan antar daerah.

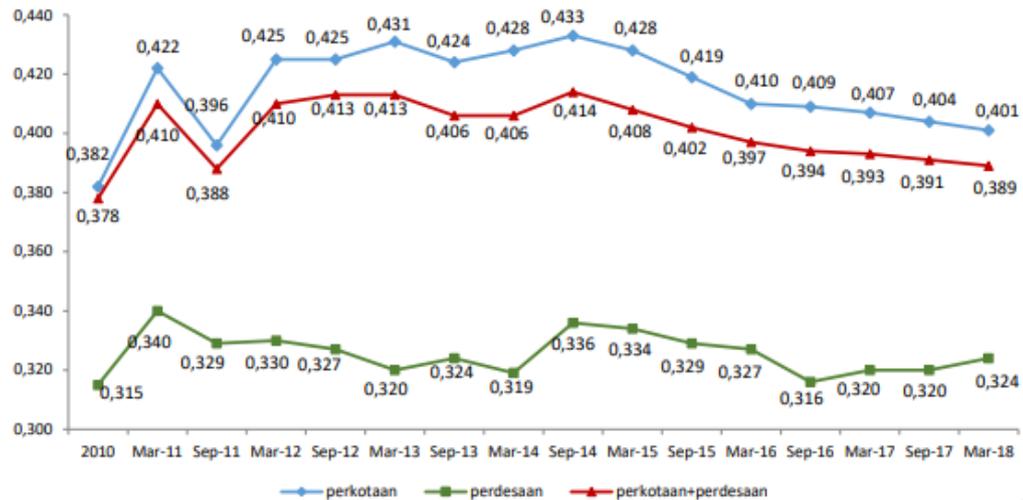
Ketimpangan pendapatan antar daerah merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau perbedaan pendapatan antara daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Kesenjangan pendapatan dapat terjadi jika suatu wilayah berkembang mempunyai struktur ekonomi yang memungkinkan terjadinya *backwash effect* atau *polarization effect* terhadap faktor-faktor ekonomi dari wilayah-wilayah yang kurang berkembang.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara pemerintah pusat dengan Daerah (Desentralisasai Fiskal), yang dimulai sejak 1 Januari 2001, dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah, dimana daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri semaksimal mungkin sehingga diharapkan pemerintah daerah akan mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah serta dapat mengelola keuangannya sendiri sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan pembangunan antar daerah semakin berimbang.

Koefisien gini (*Gini Ratio*) adalah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Agregat Koefisien gini adalah ukuran statistik pertebaran paling menonjol digunakan sebagai ukuran ketidakterataan distribusi pendapatan.

Secara nasional, nilai Gini Ratio Indonesia selama periode 2010–September 2014 mengalami fluktuasi dan mulai Maret 2015 hingga Maret 2018 nilainya mulai menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015–Maret 2018 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Nasional, 2018

Gambar 1.1

Perkembangan Gini Ratio Indonesia, 2010-Maret 2018

Dari gambar 1.1 diatas diperlihatkan bahwa pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,389. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393 turun sebesar 0,004 poin.

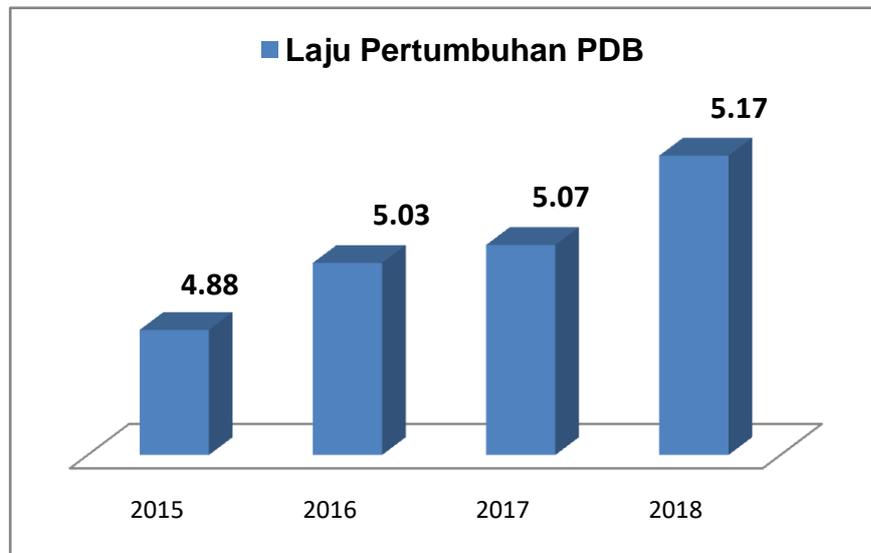
Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2018 adalah sebesar 0,401 mengalami penurunan sebesar 0,003 poin dibanding September 2017 yang sebesar 0,404 dan menurun sebesar 0,006 poin dari Maret 2017 yang sebesar 0,407. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,324, naik 0,004 poin dibandingkan dengan kondisi September 2017 dan Maret 2017 yang sebesar 0,320.

Menurut Kuznets (dalam Kuncoro, 2006: 244) seorang ekonom klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun bila negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun (Khusnah, 2015). Lebih lanjut. Kuznets menjelaskan disparitas dalam pembagian pendapatan cenderung bertambah besar selama tahap-tahap awal pembangunan, baru kemudian selama tahap-tahap lebih lanjut dari pembangunan berbalik menjadi lebih kecil, atau dengan kata lain bahwa proses pembangunan ekonomi pada tahap awal mengalami kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan, yang baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan pada tahap pembangunan lebih lanjut. (Hartini, 2017)

Dengan adanya otonomi daerah maka desentralisasipun terjadi, baik yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi dan perencanaan yang lain semuanya dilimpahkan dari pusat ke daerah. Dalam desentralisasi tersebut pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan penggunaan transfer dana perimbangan maupun dana yang bersumber dari pendapatan daerah atau penerimaan daerah yang sah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri.

Seluruh provinsi di Indonesia mendapatkan dana perimbangan setiap tahunnya. Dana perimbangan dialokasikan ke Kabupaten/Kota yang berada di provinsi masing-masing yang jumlahnya berbeda satu sama lain. Perbedaan alokasi dana perimbangan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara masing-masing Kabupaten/Kota. Akan tetapi dana perimbangan yang dialokasikan tersebut memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap provinsi serta laju pertumbuhan ekonomi nasional yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Ini dibuktikan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional terus mengalami peningkatan.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 tumbuh mencapai 5,17 persen, angka ini meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 yang sebesar 5,07 persen, peningkatan ini didorong oleh semua kategori lapangan usaha dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 9,22 persen. (Berita Resmi Statistik, 2018). Laju Pertumbuhan ekonomi tersebut disajikan pada gambar 1.2 dibawah ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional diolah, 2018

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan PDB Nasional (Persen), 2015-2018

Dua fakta yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Nasional 2018 pada gambar 1.1 dan 1.2 menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ketahun hanya berimbas pada tingkatan nasional saja, tidak serta pada tingkatan daerah. Sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar kawasan di Indonesia. Tampak jelas bahwa pertumbuhan tidak cukup signifikan memperbaiki ketimpangan. Ini dapat dilihat pada tingkat ketimpangan di Indonesia menurut tempat tinggal untuk pedesaan yang diukur dengan *Gini Ratio* pada maret 2018 kemarin tercatat sebesar 0,324, angka ini naik 0,004 dibandingkan dengan kondisi September 2017 dan Maret 2017 yang sebesar 0,320.

Salah satu bentuk komitmen pemerintah pusat dalam kebijakan desentralisasi fiskal adalah mengalokasikan anggaran transfer fiskal ke daerah yaitu Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan sebagai faktor produksi modal yang digunakan untuk belanja pemerintah daerah guna meningkatkan output. Dengan peningkatan output dalam jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian Waluyo (2007) (dalam Dodi Chandra dkk, 2017) juga menunjukkan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia diduga lebih didominasi oleh mekanisme dana alokasi umum yang berfungsi sebagai pemerata fiskal daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Begitu juga terhadap dana perimbangan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diberikan kepada daerah dalam membiayai kebutuhan khusus yang menjadi prioritas nasional. Pemberian DAK berdasarkan bidang yang dijadikan prioritas nasional seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dll. Pemberian dana transfer tersebut diharapkan menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah. Namun kondisi yang terjadi, ketimpangan semakin besar dalam setiap tahunnya. (Adhitya Wardhana dkk, 2013).

Dalam pelaksanaannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan sasaran utama bagi negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari perkembangan masing-masing sektor atau subsektor yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah. Produk Regional Bruto (PDRB) sebagai suatu indikator punya peran penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan juga dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menentukan arah pembangunan suatu daerah dimasa yang akan datang. (Darzal, 2016).

Adapun stimulus guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional dan daerah yakni Dana Desa, dimana merupakan bagian dari kegiatan pembangunan desa. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Arsyad, 2010:11) dalam (Yasa, 2015). Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan.

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu

sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. (Endang Juliana, 2017).

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa, dananya ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Namun sebelum adanya anggaran Dana Desa, disetiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan ADD didapat dari pembagian Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dana Desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan wilayah guna untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota dan peningkatan perekonomian di desa.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa

meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. (buku pintar dana desa)

Desa sebagai daerah otonom yang berada pada tingkatan terendah secara otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desa merupakan salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan pusat. Hal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. (Irma Setianingsih, 2015).

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul ***ANALISIS DAU, DAK, DANA DESA TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2015-2018***. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kondisi ketimpangan pendapatan yang diukur dengan *Gini Ratio* di Indonesia selama periode 2010–September 2014 mengalami fluktuasi dan mulai Maret 2015 hingga Maret 2018 nilainya mulai menurun.
2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya berimbas pada tingkat nasional tidak serta pada tingkatan daerah. Sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar kawasan di Indonesia.
3. Peningkatan Dana Desa setiap tahunnya belum memberikan dampak signifikan terhadap ketimpangan dsitribusi pendapatan di daerah pedesaan.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 2015-2018?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 2015-2018?
3. Bagaimana pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 2015-2018?
4. Apakah peningkatan Dana Desa berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia selama tahun 2015-2018?
5. Bagaimana pengaruh peningkatan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia selama tahun 2015-2018?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 2015-2018.
2. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 2015-2018.
3. Menganalisis pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 2015-2018.

4. Mengetahui peningkatan Dana Desa terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia selama tahun 2015-2018.
5. Mengetahui pengaruh peningkatan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia selama tahun 2015-2018.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang masalah-masalah pembangunan ekonomi yang ada di daerah, khususnya Seluruh Provinsi di Indonesia.
2. Penelitian ini dapat melengkapi kajian studi mengenai ketimpangan distribusi pendapatan nasional dan factor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Sebagai sumber masukan yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia
4. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan tambahan referensi mengenai permasalahan di Indonesia secara umum untuk penelitian berikutnya mengenai analisis transfer pemerintah pusat terhadap ketimpangan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi, serta dapat membantu pemerintah daerah dalam memberi masukan dan penilaian.